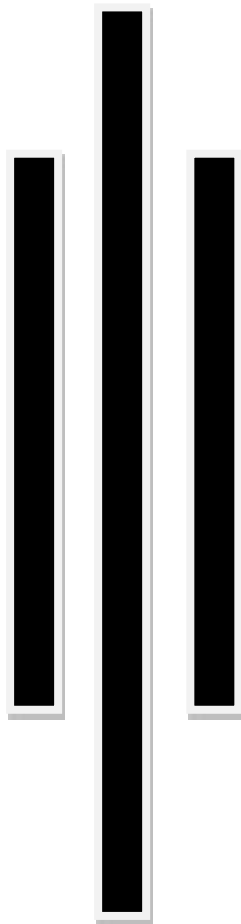


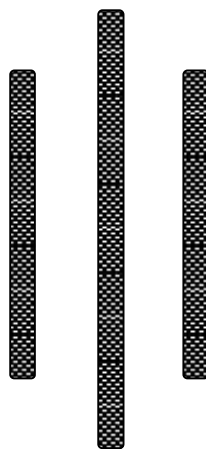
REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2011-2016**



**REVISI RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBRANA**



**JALAN MAYOR SUGIANYAR
NO. 19 NEGARA – BALI
TAHUN 2011-2016**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENDAPATAN
Jalan Mayor Sugianyar No. 19 Telp. 4545120
NEGARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 570/ DISPENDA / 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA

KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang : bahwa dalam rangka mengintegrasikan program-program pembangunan didaerah sebagai pelaksana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tahun 2011-2016

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

- Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 41);
 5. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 480);
 6. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Rencana Strategis Dinas Pendapatan Tahun 2011-2016
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud dictum kesatu adalah dokumen perencanaan lima tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Jembrana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana yang bersifat indikatif.
- KETIGA** : Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud dictum Kesatu berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT** : Sistematika Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBRANA

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI : INDIKATOR DINAS PENDAPATAN KABUPATEN
JEMBRANA

BAB VII : PENUTUP

KELIMA : Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun
2011-2016 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Negara.
Pada tanggal : 05 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Jembrana,

I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19691119 199603 1 006

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
2. Bappeda Kabupaten Jembrana
3. Inspektorat Kabupaten Jembrana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi WaÇa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 dapat diselesaikan.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Tahun 2011-2016 ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 yang telah disusun dan diakui masih jauh dari sempurna.

Harapan kami, dengan tersusunnya Revisi Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 ini dapat sebagai acuan dan memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait sekaligus dapat mengambil peran dengan berpartisipasi aktif yang bermuara pada pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya kedepan perlu diadakan penyempurnaan dan perbaikan secara bertahap dan bertanggung jawab sebagai wujud dari penyelenggaraan *Good Government*. Serta kami harapkan segala kritik dan saran guna penyempurnaan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Negara, 05 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Jembrana

I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si

Pembina Tk. 1

NIP. 19691119 199603 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SK RENSTRA	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	4
1.4. Hubungan Renstra Dengan Dokumen Lainnya	4
1.5. Sistematika Renstra.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA	
2.1. Peran Dispenda Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	11
2.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peningkatan PAD	14
2.3. Struktur Organisasi	16
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana	19
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	19
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Bali	20
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..	22
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	27
3.6. Analisis Internal dan Eksternal	28
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
4.1. Visi	30
4.2. Misi	30
4.3. Tujuan	30
4.4. Sasaran	30
4.5. Strategi	31
4.6. Arah Kebijakan	32

**BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN
INDIKATIF**

5.1. Pengertian Program	34
5.2. Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana.....	35
5.3. Pagu Indikatif Penyelenggaraan Program dan Kegiatan.....	37

BAB VI INDIKATOR DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA

6.1. Pengukuran Indikator Kinerja.....	41
6.2. Indikator Kinerja Utama	42

BAB VII PENUTUP.....	44
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan Daerah, yang murni dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan di masing-masing Daerah. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali secara optimal seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memungkinkan untuk dipungut sepanjang diatur oleh Peraturan Perundangan baik itu Undang-Undang sebagai payung hukum tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah yang menjadi implementasi dari Undang-Undang tersebut.

Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menambah kewenangan pemungutan/ pelayanan beberapa Pajak Daerah yang sebelumnya ditangani oleh Pemerintah Pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pemerintah Provinsi yaitu Pajak Air Tanah.

Kondisi ini mestinya membawa dampak terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah baik itu di sektor Pajak maupun Retribusi. Tetapi pada kenyataannya dengan adanya penambahan kewenangan/ pelayanan terhadap beberapa urusan pajak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, justru menyebabkan Pendapatan Daerah menjadi menurun secara keseluruhan, dibandingkan dengan sebelumnya. Ini disebabkan karena ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih memihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga beberapa sektor pendapatan dari Retribusi Daerah tidak diperbolehkan untuk dipungut.

Selanjutnya setiap Pemerintah Daerah harus berupaya seoptimal mungkin melalui program Intensifikasi maupun Ekstensifikasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, selain itu tentu saja perlunya kesiapan untuk melaksanakan pelayanan baru terhadap perpajakan yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), disamping Pajak dan Retribusi lainnya.

Selama ini pendapatan Kabupaten Jembrana dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah masih sangat kecil, yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti : masih terbatasnya potensi, belum optimalnya intensifikasi pelaksanaan pemungutan, lemahnya sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mulai dari, Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Pelaporan.

Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana merupakan instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana disusun sebagai wujud komitmen Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan disusun dalam kurun waktu lima tahunan, dan proses penyusunan melalui beberapa tahapan. **Pertama**, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penetapan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, visi dan misi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana serta memperhatikan visi dan misi Bupati Jembrana, serta kementerian terkait.; **Kedua** menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; **Ketiga** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah

terakhir menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Jember disusun dengan maksud dan tujuan:

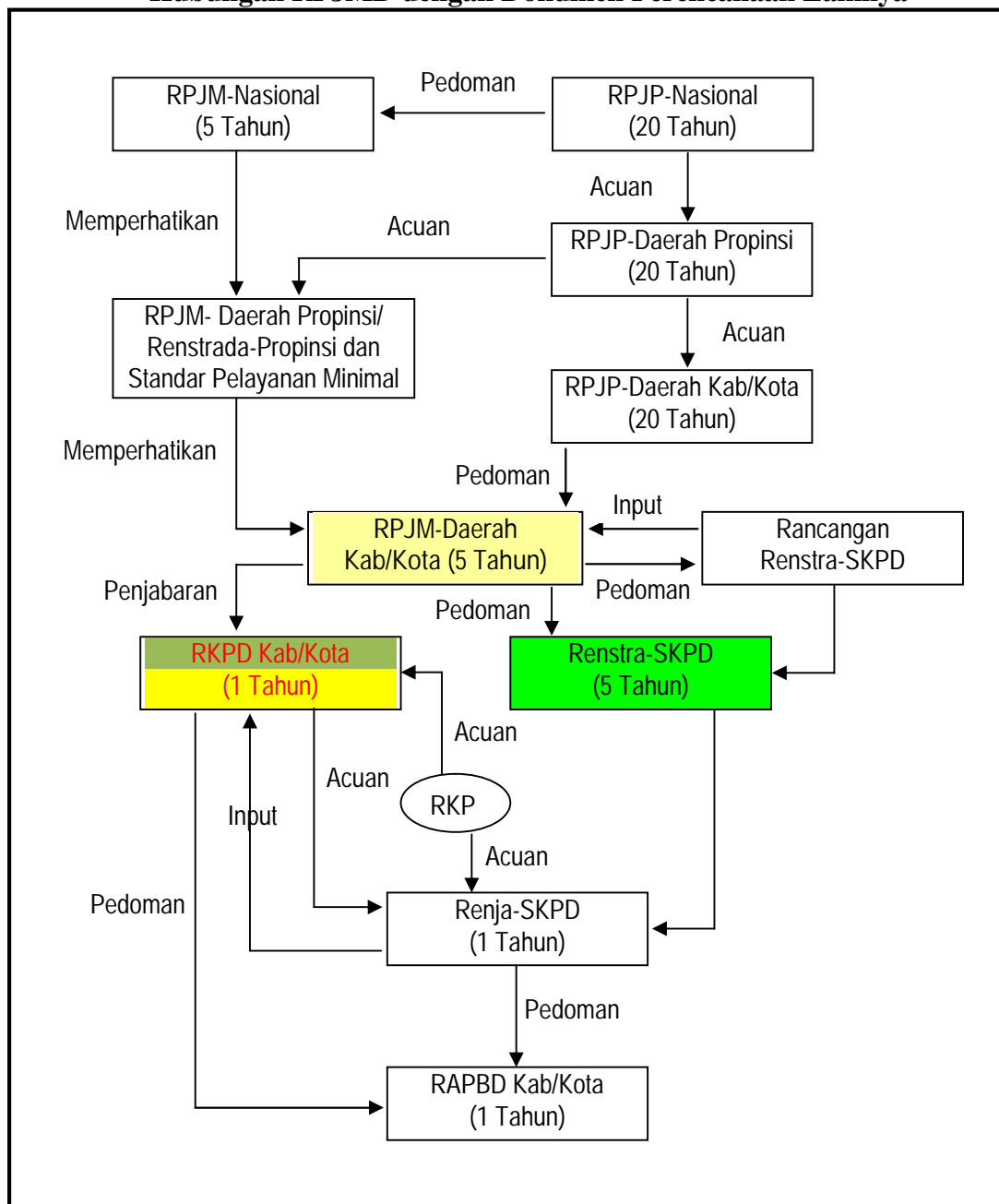
1. Untuk mengoptimalkan arah kebijakan pokok pembangunan sebagaimana Visi dan Misi serta prioritas program tahunan sesuai dengan profil layanan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember sehingga setiap penggunaan anggaran tepat guna.
2. Untuk melakukan koreksi perencanaan dan penganggaran sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja
3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah dipagukan oleh Kepala Daerah
4. Sebagai dasar atau acuan dalam mengajukan usulan di tahun berikutnya

1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, maka Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

sangat terkait dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Jembrana. Rancangan Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dipakai sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD. Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dipakai acuan dalam penyusunan Renja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana yang selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam LAKIP setiap tahun.

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.5 Sistematika Renstra

Mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas, Pengertian Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, Fungsi Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah. Proses penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dengan RPJMD, Renstra Kabupaten, dan Renja. Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, Memuat Landasan Hukum: Penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana. Sistematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan

fungsi) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana. Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, Tugas, Fungsi, dan menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum, struktur organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana (proses, prosedur, mekanisme). Sumber daya ; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal. Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana memuat; tingkat capaian kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana periode sebelumnya, Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pendapatan Daerah; Bagian ini

mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis; Pada bagian ini direview kembali faktor-

faktor dari pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana ditinjau dari gambaran pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, sasaran jangka menengah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, dan implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana.

Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dalam lima tahun mendatang.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA

2.1 Peran (Tugas Dan Fungsi) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Jembrana dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber – sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang – undangan (*money follow function*). Analisis keuangan daerah pada prinsipnya dimanfaatkan untuk memberi gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu sebelum penentuan arah Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Jembrana lima tahunan melalui rencana keuangan tahun dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pendanaan Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi :

- a) Pendapatan Daerah;
- b) Belanja Daerah;
- c) Pembiayaan Daerah.

Dari struktur APBD tersebut untuk dapat menilai kinerja pelaksanaan APBD dilakukan dengan menganalisa dari masing – masing susunan/ struktur APBD dimaksud dan perkembangan Neraca Daerah.

Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Jember telah mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah atasan maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi, oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi Perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja menganggur. Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli masyarakat akan semakin rendah. Kebijakan keuangan diarahkan pada :

- a. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap.
- b. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang syah lainnya;
- c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan

tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- 3) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Capaian kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana periode sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumber Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Selama Kurun waktu 2011 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain – lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI		PENINGKATAN REALISASI	
			Rp.	%	Rp	%
1	2009	20.755.681.446,00	33.952.879.718,41	163,58	12.717.373.855,36	59,89
2	2010	32.824.809.067,67	34.380.822.968,32	104,74	427.943.249,91	1,26

3	2011	36.247.620.073,57	41.330.605.674,41	114,02	6.146.785.491,85	17,88
4	2012	51.525.703.700,74	46.470.110.900,58	90,19	5.139.505.226,17	12,43
5	2013	63.525.477.340,13	68.485.482.416,04	107,81	22.015.371.515,48	47,38
6	2014	70.007.622.572,45	89.349.644.542,62	127,63	20.864.162.127,58	30,47
7	2015	72.832.070.989,80				
8	2016	85.125.025.607,00				

**Realisasi sebelum audit BPK*

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp.20.864.162.127,58 atau 30,47% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2013 sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

2.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peningkatan PAD

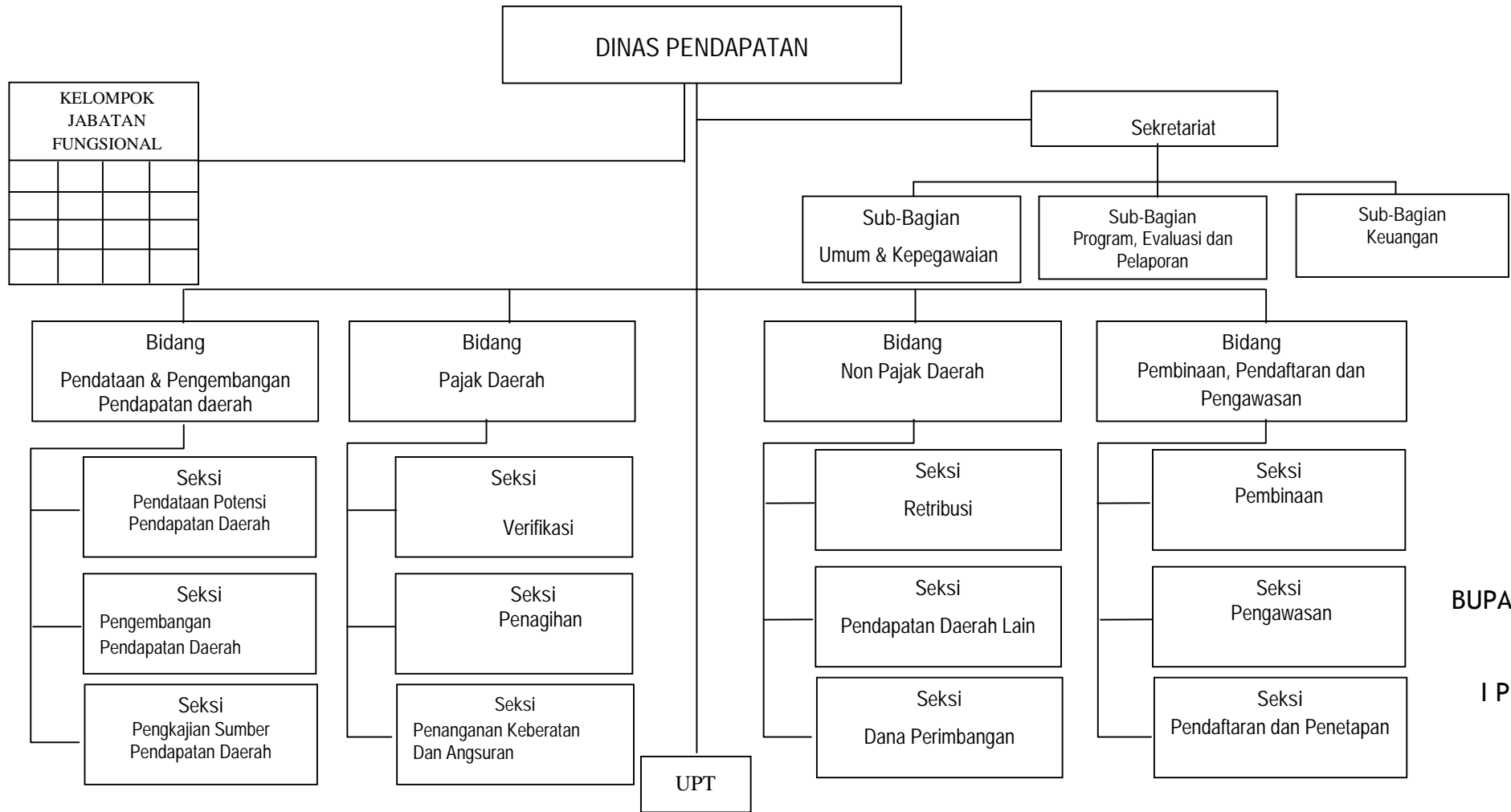
Faktor Pendukung antara lain :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik
- Komitmen SDM cukup tinggi.
- Adanya Dasar hukum seperti undang-undang 28 tahun 2009, perda-perda, perbup, dan SK
- Dukungan dari pengusaha dan pihak ketiga cukup baik
- Koordinasi yang baik dengan SKPD terkait pengelolaan PAD.

Faktor Penghambat antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat / WP dalam memberikan informasi potensi yang ada.
- Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak masih rendah.
- Sarana dan prasarana masih kurang.
- Belum adanya penerapan sistem pengelolaan PAD secara online.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA



BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA

2.3 Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas membawahi
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian PEP
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan potensi Pendapatan Daerah
 - b. Seksi Pengembangan Pendapatan Daerah
 - c. Seksi Pengkajian Sumber Pendapatan Daerah
4. Bidang Pajak Daerah, membawahi :
 - a. Seksi verifikasi
 - b. Seksi Penagihan
 - c. Seksi Penanganan keberatan dan angsuran
5. Bidang Non Pajak Daerah, membawahi :
 - a. Seksi Retribusi
 - b. Seksi Pendapatan Daerah Lain
 - c. Seksi Dana Perimbangan
6. Bidang Pembinaan, pendaftaran dan Pengawasan yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan
 - b. Seksi Pengawasan
 - c. Seksi Pendaftaran dan Penetapan.

Tugas Pokok, dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok : melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten Jembrana di bidang Pendapatan Daerah.
2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan kebijakan teknis di bidang pendapatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Melakukan koordinasi teknis dengan SKPD terkait yang berkaitan dengan PAD.

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dalam peyelenggaraan pemerintahan, dan agar dapat terlaksana dengan baik tugas pokok dan fungsi tersebut, serta terwujudnya agenda pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMD, Dinas Pendapatan harus memiliki potensi sumber daya Manusia yang handal sebagai modal atau suatu kekuatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dinas Pendapatan. Adapun sumberdaya manusia sebagai potensi / kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan dapat dilihat di bawah ini :

1. Berdasarkan Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah (Orang)
I		1			1
II	2	4	3		9
III	2	8	10	8	28
IV	1	3			4
Jumlah					42

2. Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Esselon II.B	1
2.	Esselon III.A	1
3.	Esselon III.B	4
4.	Esselon IV.A	15
5.	Staf	21
Jumlah		42

3. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S-3	-
2.	S-2	2
3.	S-1/D-IV	24
4.	D-III	-
5.	SLTA	15
6.	SLTP	1
Jumlah		42

Misi Dinas Pendapatan

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui program Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana.
3. Meningkatkan pengelolaan PAD melalui penerapan sistem online.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

Keuangan Daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan di daerah, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan strategi secara tepat.

Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat, maka akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Otonomi daerah dengan penetapan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehingga ke depan, secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pengelolaan pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang ada di daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah antara lain :

1. Potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal
2. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat
3. Kurang selarasnya regulasi dari pusat dengan kondisi di daerah
4. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak

Isu strategis yang di hadapi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat yang disebabkan belum sempurnanya prosedur dan standar operasi pelayanan pengelolaan pendapatan asli daerah karena belum memadainya sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Perumusan Visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen

Kabupaten Jembrana, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 -2016 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016 ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Terkait dengan tupoksi Dinas Pendapatan maka tugas yang relevan adalah misi satu yaitu Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Bali

Analisis Renstra K/L dan Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Bali ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Bali dan Renstra K/L; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Bali atau Renstra K/L.

Tabel 3.2

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana terhadap Sasaran Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Bali dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana	Sasaran pada Renstra Dinas Pendapatan Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Kesekretariatan			
	Persentase SKPD Menyusun LAKIP tepat waktu	100%	100%	100%
	Ketersediaan bahan LPPD	100%	100%	100%
	Ketersediaan bahan LKPJ	71%	100%	100%
2	Bidang Pendataan dan Pengembangan Pajak Daerah			
	Persentase Pelaksanaan Pendataan	100%	100%	100%
	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	100%	100%	100%
	Persentase Pelaksanaan Kajian Sumber Pendapatan Daerah	100%	100%	100%
3	Bidang Pajak Daerah			
	Persentase Tersebar SKPS Pajak Daerah	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana	Sasaran pada Renstra Dinas Pendapatan Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
	Prosentase Meningkatnya Pendapatan PBB	100%	100%	100%
	Prosentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	100%
4.	Bidang Non Pajak Daerah			
	Prosentase tercapainya pendapatan dari non pajak daerah	95%	95%	95%
	Prosentase tersebarnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	100%	100%	100%
5	Bidang Pembinaan Pendaftaran dan Pengawasan Pendapatan Daerah			
	Persentase tersedianya penyusunan pelaporan bulanan PAD	100%	100%	100%
	Persentase pelaksanaan Binwas Pendapatan Daerah	100%	100%	100%

Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mechanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang ditempuh. Hal inilah yang akan diupayakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana agar capaian kinerja minimal mendekati Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Bali.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan Ektensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Ektensifikasi

pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah. Disamping itu sebagai bentuk ektensifikasi terhadap pendapatan daerah, pada tahun 2011 telah ditetapkan beberapa Peraturan Daerah sebagai dasar hukum Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
2. Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
3. Perda 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air tanah
4. Perda 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
5. Perda 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
6. Perda 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
7. Perda 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
8. Perda 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
9. Perda 7 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet
10. Perda 8 Tahun 2011 tentang Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan
11. Perda 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
12. Perda 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
13. Perda 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
14. Perda 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu

Dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah juga telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan;
2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan Jembrana;

3. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang pendapatan melalui bintek dan diklat secara bertahap;
4. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya;
6. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan langsung kepada subyek pajak dan subyek retribusi.

Adapun jenis-jenis sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Air Tanah
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Reklame
6. Pajak BPHTB
7. Pajak Penerangan Jalan
8. Pajak Parkir
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pasir Batu Kali
10. Pajak Sarang Burung Walet
11. Pajak PBB-P2

b. Retribusi Daerah terdiri dari :

Retribusi Jasa Umum terdiri dari 8 jenis meliputi:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
2. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4. Retribusi Pelayanan Pasar
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 8. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- c. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari 5 jenis meliputi:
1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 2. Retribusi tempat pelelangan
 3. Retribusi terminal
 4. Retribusi rumah potong hewan
 5. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- d. Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari 5 jenis meliputi:
1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
 2. Retribusi Ijin Gangguan Keamanan
 3. Retribusi Ijin Trayek
 4. Retribusi Ijin usaha Perikanan
 5. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- e. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (PT. Bank Pembangunan Daerah Bali).
- f. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:
1. Penerimaan Jasa Giro
 2. Bunga Deposito
 3. Lain-lain PAD

Tabel. 3.3
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Dinas Pendapatan
Kabupaten Jembrana

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Pendapatan Kab. Jembrana	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Kab. Jembrana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Terbatasnya daya dukung dan daya tampung ling hidup	Kajian dan pemanfaatan lahan terkait dengan Peningkatan PAD	1). Pendataan Pajak/Retribusi Daerah, 2). Gebyar PBB,

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Pendapatan Kab. Jembrana	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Kab. Jembrana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	untuk pembangunan			3). Penyusunan Proyeksi dan Evaluasi PAD, 4). Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah, 5). Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah, 6). Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah,
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Pembangunan menyebabkan penyusutan dan perusakan LH	Kajian tentang dampak dan resiko LH terkait dengan Potensi PAD	1). Penyusunan Kajian Tentang Potensi Pajak Daerah, 2). Penyusunan Kajian Tentang Potensi Retribusi Daerah.
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Menurunnya kualitas lingkungan	Kajian Peningkatan kualitas Ling terkait dengan Potensi PAD	1). Penyusunan Kajian Tentang Potensi Pajak Daerah, 2). Penyusunan Kajian Tentang Potensi Retribusi Daerah.
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Pembatasan pemanfaatan SDA	Kajian Pemanfaatan SDA terkait dengan Potensi PAD	1). Penyusunan Kajian Tentang Potensi Pajak Daerah, 2). Penyusunan Kajian Tentang Potensi Retribusi Daerah.
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Menurunnya kelestarian akibat perubahan iklim	Kajian dampak perubahan iklim terhadap LH terkait dengan Potensi PAD	1). Penyusunan Kajian Tentang Potensi Pajak Daerah, 2). Penyusunan Kajian Tentang Potensi Retribusi Daerah.
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Berkurangnya ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Kajian dan penanggulangan keanekaragaman hayati terkait dengan Potensi PAD	1). Penyusunan Kajian Tentang Potensi Pajak Daerah, 2). Penyusunan Kajian Tentang Potensi Retribusi Daerah.

Tabel . 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dispenda
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 6 Penataan Kepemerintahan dan SDM			
	Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Publik Program-Program : a. Pelayanan administasi perkantoran. b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur c. Program peningkatan disiplin aparatur d. Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan e. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya Stándar Operasional Presedur (SOP) dalam proses Pelaksanaan Perencanaan. • Masih rendahnya Kualitas • 	<ul style="list-style-type: none"> • Dominasi Keputusan Politik Dalam Perencanaan Pembangunan. • Pemahaman yang keliru dari Stakeholder terhadap hasil • 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Standarisasi Regulasi Secara Nasional Terhadap Perencanaan. • Kuatnya Komitmen Dukungan Kepala Daearah dan Wakil Kepala Daerah terhadap PAD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jembrana secara umum sangat dipengaruhi oleh keterbatasan potensi yang dimiliki, karena sektor pariwisata yang semestinya mampu mendorong sektor lain untuk berkembang lebih baik, ternyata belum bisa diharapkan secara optimal. Disamping itu kemampuan ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban terhadap aspek perpajakan dan retribusi juga perlu terus ditingkatkan sejalan dengan tuntutan kebutuhan dan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat Jembrana. Kedepan upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengembangkan usaha perlu terus

ditingkatkan melalui penyiapan beberapa fasilitas, kemudahan informasi serta peningkatan kemampuan terhadap perpajakan.

Untuk mendukung program tersebut perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap perpajakan dan kewajiban lainnya,
2. Mempermudah pengurusan ijin dan fasilitasi pasar baik lokal, regional maupun nasional.

3.6 Analisis Internal dan Eksternal

Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi beberapa penerimaan pajak :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Parkir,
7. Pajak Air Tanah,
8. Pajak Pajak Sarang Burung Walet,
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
10. Pajak PBB-P2,
11. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,

Untuk mewujudkan realisasi pendapatan sebagaimana tersebut diatas diperlukan Analisis Internal dan Analisis Eksternal sebagai berikut :

1. Analisis Internal.

a. Kekuatan :

1. Peraturan Daerah dan Aturan yang mendukung lengkap,
2. Kelembagaan dan struktur memadai,
3. Tupoksi ada dan lengkap,
4. Adanya SISDUR dan Juknis,
5. Potensi sumber daya lingkungan yang memadai.

b. Kelemahan :

1. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur dibidang perpajakan dan retribusi,
2. Fasilitas kerja terbatas,
3. Lambatnya pelayanan,
4. Masih lemahnya pengawasan internal,
5. Kurangnya pengakuan terhadap prestasi kerja.

2. Analisis Eksternal.

a. Peluang :

1. Berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004,
 - Berlakunya Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004,
 - Berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009.
2. Luasnya kewenangan yang dimiliki,
3. Bertambahnya potensi di daerah,
4. Regulasi pengelolaan keuangan daerah,
5. Peningkatan investasi perdagangan lokal.

b. Tantangan :

1. Stabilitas sosial politik masyarakat kurang mendukung,
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi,
3. Kurangnya koordinasi antar instansi,
4. Banyaknya tuntutan publik karena lemahnya kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang – undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Visi

Terwujudnya kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan melalui peningkatan pendapatan asli daerah.

4.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut dan memberikan arah serta tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan misi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui program Ekstensifikasi dan Intensifikasi.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.
3. Meningkatkan pengelolaan PAD melalui penerapan sistem on line.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan.

4.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki.

4.4 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil. Tujuan dan Sasaran dari masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1 :

Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui program Ekstensifikasi dan Intensifikasi.

Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sasaran : Meningkatnya pendapatan asli daerah

Misi 2 :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transparan dan akuntabel.

Sasaran : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Misi 3 :

Meningkatkan pengelolaan PAD melalui penerapan sistem on line.

Tujuan : Menyediakan sarana dan prasarana

Sasaran : Meningkatnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah

Misi 4 :

Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan.

Tujuan : Meningkatkan sumber-sumber pendapatan

Sasaran : Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah.

4.5 Strategi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan PAD sehingga Pendapatan Daerah menjadi meningkat maka ada beberapa strategi dari pernyataan misi yang harus dilaksanakan, antara lain :

Misi 1

Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui program Ekstensifikasi dan Intensifikasi.

Strategi :

1. Mengumpulkan data dan penetapan Wajib Pajak,
2. Mengintensifkan pemungutan/ penagihan terhadap wajib pajak yang ada,
3. Melaksanakan pengembangan terhadap wajib pajak dan retribusi.

Misi 2

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

Strategi :

1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam pelayanan pajak dan retribusi terlebih lagi persiapan penanganan PBB-P2 dan BPHTB serta Pajak Air Tanah,
2. Meningkatkan dan memenuhi standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Misi 3

Meningkatkan pengelolaan PAD melalui penerapan sistem on line.

Strategi :

1. Memperbaiki sistem pengelolaan dari pendataan, pendaftaran penetapan, penagihan serta pelaporan yang terstandar dan memiliki kepastian serta memanfaatkan IT.

Misi 4

Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan dan fasilitas pelayanan yang disiapkan.

Strategi :

1. Melaksanakan pembinaan/ pengawasan yang intensif terhadap wajib pajak.

4.6 Arah Kebijakan

Penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki. Sesuatu

yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Arah Kebijakan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember sebagai berikut :

Misi 1

Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui program Ekstensifikasi dan Intensifikasi.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan berkelanjutan,
2. Meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Misi 2

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan pengetahuan petugas pungut tentang tata cara pemungutan pajak.

Misi 3

Meningkatkan pengelolaan PAD melalui penerapan sistem on line.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan penguasaan sistem pengelolaan yang berbasis IT.

Misi 4

Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan dan fasilitas pelayanan yang disiapkan.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta penilaian terhadap wajib pajak

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.

5.1 Pengertian Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana tidak dapat dilaksanakan dalam lingkup Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana belaka, ada pula yang dilaksanakan melalui lintas SKPD. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Adapun Program dan Kegiatan Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 sebagai berikut :

5.2 Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

A. Rencana Program dan Kegiatan, yang di tempuh oleh Dinas Pendapatan, sebagai berikut :

Misi I : Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui program Ekstensifikasi dan Intensifikasi.

Sasaran : Meningkatnya pendapatan asli daerah

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah
 - Penyebaran SKPS Pajak Hotel dan Restoran
 - Penyebaran SKPS Pajak Daerah
 - Penyusunan Proyeksi PAD
 - Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Gebyar PBB
 - Sosialisasi Pajak Daerah/Retribusi Daerah
 - Bimbingan Teknis Pajak Hotel dan Restoran
 - Pekan Panutan PBB-P2
 - Pendataan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Misi II : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

Sasaran : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Misi III : Meningkatkan pengelolaan PAD melalui penerapan sistem online.

Sasaran : Meningkatnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pengadaan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
 - Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah

Misi IV : Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan.

Sasaran : Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah.

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah
 - Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
 - Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah

5.3 Pagu Indikatif Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana.

Pagu Indikatif penyelenggaraan program dan kegiatan dijabarkan, adapun pagu indikatif sebagaimana table berikut :

No	Progrm/Kegiatan	INDIKATIF ANGGARAN					
		TAHUN (Termasuk peralihan tahun 2016)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Misi 1						
	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
	- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah			634.888.000	637.477.000	1.170.838.000	1.170.838.000
	- Intensifikasian Ekstensifikasi Non Pajak Daerah			2.576.576.200	2.454.190.400	2.685.338.000	2.685.338.000
	- Penyebaran SKPS Pajak Hotel dan Restoran	9.654.000	21.275.000	309.836.400			
	- Penyebaran SKPS Pajak Daerah				239.829.000		
	- Penyusunan Proyeksi dan Evaluasi Pajak Asli Daerah		9.340.000	9.250.000	4.365.000		
	- Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			268.218.000	504.490.750		
	- Gebyar PBB	3.996.000	136.219.103	350.534.300	296.505.400		
	- Sosialisasi Pajak Daerah/Retribusi		151.604.500	34.108.800	23.861.000		

	Daerah						
	- Bimbingan Teknis Pajak Hotel dan Restoran		29.100.000				
	- Pemanfaatan PBB-P2					246.255.000	246.255.000
	Misi II						
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat		13.600.000	10.250.000	5.280.000	3.000.000	3.000.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		30.000.000	19.200.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		13.122.700	48.853.300	23.352.000	48.113.000	34.125.000
	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				83.650.000	36.000.000	51.000.000
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor		202.638.000	80.270.600	92.950.000	79.102.400	57.815.800
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		306.083.597	99.797.150	53.102.750	36.174.700	24.330.000
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.396.000	19.525.000	3.370.000
	- Penyediaan Makanan dan		14.400.000	21.200.000	30.375.000	22.420.000	26.875.000

	Minuman						
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		199.480.000	200.000.000	198.500.000	153.940.000	153.940.000
	- Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan		11.480.000	18.300.000	24.801.000	14.400.000	29.355.000
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	150.200.000	542.212.000	142.050.000	352.693.000	147.400.000	28.000.000
	- Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor			32.000.000	15.780.000	16.380.000	106.283.840
	- Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		26.900.000	182.454.550	148.273.000	106.842.500	106.842.500
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
	- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		20.200.000	14.000.000	28.000.000	14.000.000	15.050.000
	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						

	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14.472.000	14.494.000	17.694.000	45.758.000
	Misi III						
	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
	- Pengadaan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah				553.420.000		
	- Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah					425.550.200	415.776.800
	Misi IV						
	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
	- Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah		7.627.500				
	- Penyusunan Evaluasi Pendapatan Daerah		28.760.000	36.080.000	257.872.800		
	- Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah		19.500.000	138.134.800	139.940.000	253.502.300	218.437.800

BAB VI

INDIKATOR DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA

6.1. Pengukuran Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP. Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.2 Indikator Kinerja Utama

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan

ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator Kinerja Utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

BAB VII PENUTUP

Demikian Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016 disusun dengan harapan dapat membantu pencapaian target pendapatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana yang pada akhirnya dapat dipergunakan untuk membiayai tugas umum pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam menyusun RKA setiap tahun Anggaran.

Negara, 05 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Jembrana

I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19691119 199603 1 006

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD					
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp			TARGET	Rp
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase cakupan layanan administrasi perkantoran	90%	90%	0	790.804.297	90%	497.871.050	90%	550.406.750	90%	442.675.100	90%	441.860.500	90%	2.723.617.697	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA			
	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		1.20.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya Jasa Materai dan Perangko	6.000 lbr			1.320 lbr	13.600.000	2.550 lbr	10.250.000	1.320 lbr	5.280.000	600 lbr	3.000.000	650 lbr	3.000.000	6.440 lbr	35.130.000	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA		
			1.20.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening air dan telepon	4 paket			1 paket	30.000.000	1 paket	19.200.000	1 paket	30.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	26.400.000	5 paket	135.600.000	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA		
			1.20.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia Jumlah tenaga kontrak terbayar	80 jenis 4 orang			18 jenis	13.122.700	18 jenis	48.853.300	18 jenis	23.352.000	26 jenis	48.113.000	21 jenis	22.396.800	101 jenis	155.837.800	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA		
			1.20.06.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang di service/ diperbaiki	20 jenis							6 jenis	83.650.000	6 jenis	36.000.000	11 jenis	39.000.000		158.650.000				
			1.20.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	280 jenis			56 jenis	202.638.000	56 jenis	80.270.600	56 jenis	92.950.000	65 jenis	79.102.400	65 jenis	46.999.700	298 jenis	501.960.700	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA		
			1.20.06.01.11	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	2.700 jenis 972.000 lembar			1.365 buku 328.210 lbr	306.083.597	1.365 buku 328.210 lbr	99.797.150	23 jenis 232.435 lbr	53.102.750	10 jenis 12.061 lbr	36.174.700	2 jenis cetakan 72.000 lembar	24.177.000	2.765 jenis 972.916 lembar	519.335.197	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA		
			1.20.06.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 jenis							3 jenis	8.396.000	8 jenis	19.525.000	4 jenis	1.933.000	15 jenis	29.854.000				
			1.20.06.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Snack dan nasi kotak yang tersedia	6.500 kotak 140 orang 280 bungkus 900 kotak 320 buah			1.680 kotak	14.400.000	1.680 kotak	21.200.000	1.850 kotak	30.375.000	1.727 kotak	22.420.000	1.352 kotak	34.725.000	6.609 kotak	123.120.000	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA		
			1.20.06.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	48 bulan			12 bulan	199.480.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	198.500.000	12 bulan	153.940.000	12 bulan	204.404.000	60 bulan	956.324.000	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA		

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.20.06.01.23	Penyediaan Jasa Upakara dan Banten	Tersedianya upakara dan banten	12 paket			4 paket	11.480.000	4 paket	18.300.000	3 paket	24.801.000	3 paket	14.400.000	4 paket	38.825.000	16 paket	107.806.000	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA
			1.20.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		90%	150.200.000	90%	569.112.000	90%	356.504.550	90%	516.746.000	90%	270.622.500	90%	248.421.000	90%	2.111.606.050	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA
			1.20.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah tersedianya peralatan gedung kantor	70 unit	4 unit	150.200.000	10 unit	542.212.000	10 unit	142.050.000	10 unit	352.693.000	15 unit	147.400.000	4 unit	18.000.000	73 unit	1.352.555.000	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA
			1.20.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	10 unit					5 unit	32.000.000	1 unit	15.780.000	2 unit	16.380.000	5 unit	118.380.000	13 unit	182.540.000		
			1.20.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	37.000 liter			9.440 liter	26.900.000		182.454.550		148.273.000		106.842.500		112.041.000		576.511.050	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA
						40 buah					9440 liter		8.463 liter		4.933 liter		4.933 liter		37.209 liter			
						40 unit					11 unit		11 unit		11 unit		11 unit		44 unit			
						3 orang					1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		4 orang			
			1.20.06.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase cakupan disiplin aparatur				90%	20.200.000	90%	14.000.000	90%	28.000.000	90%	14.000.000	90%	14.000.000	90%	90.200.000		
			1.20.06.03.05	Pengadaan Khusus Pakaian Hari-hari tertentu	Terbelinya pakaian olahraga	160 stel			90%	20.200.000	40 stel	14.000.000	40 stel	28.000.000	40 stel	14.000.000	43 stel	14.000.000	163 stel	90.200.000		
						30 stel							35 stel						35 stel			
						35 stel			40 stel										40 stel			
			1.20.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan				0	90%	14.472.000	90%	14.494.000	12 bulan	17.694.000	12 bulan	24.443.000	12 bulan	71.103.000	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA	
			1.20.06.06.01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen/Laporan	15 dokumen					5 dokumen	14.472.000	5 dokumen	14.494.000	5 dokumen	17.694.000	5 dokumen	24.443.000	20 dokumen	71.103.000	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							2011		2012		2013		2014		2015		2016					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						10 dokumen					3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		12 dokumen			
	Meningkatnya pendapatan asli daerah		1.20.03.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Presentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		90%	13.650.600	90%	347.538.603	90%	3.915.193.700	90%	3.656.227.800	90%	4.325.418.000	90%	4.359.594.300	90%	16.617.623.003	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA
			1.20.06.17.50	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD sebagai hasil pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	150%					99,85%	634.888.000	36,44%	637.477.000	10%	1.170.838.000	10%	1.433.398.000	156,29%	3.876.601.000	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA
			1.20.06.17.49	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah	Presentase Peningkatan PAD sebagai hasil pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah	25,47%					12,95%	2.576.576.200	9,68%	2.454.190.400	2,42%	2.685.338.000	2,42%	2.482.218.800	27,47%	10.198.323.400	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA
			1.20.03.17.23	Penyebaran SKPS Pajak Hotel dan Restoran	Terlaksananya penyebaran surat ketetapan pajak daerah	900 WP	311 WP	9.654.600	323 WP	21.275.000	304 WP	309.836.400							938 WP	340.766.000	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA
			1.20.06.17.23	Penyebaran SKPS Pajak Daerah	Terlaksananya penyebaran surat ketetapan pajak daerah	95%							100%	239.829.000					100%	239.829.000		
			1.20.06.17.20	Penyusunan Proyeksi dan Evaluasi PAD	Tersusunnya dokumen proyeksi PAD yang tersusun	5 Dokumen			2 dokumen	9.340.000	4 dokumen	9.250.000	1 dokumen	4.365.000					7 Dokumen	22.955.000	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA
				Pendataan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan	8 kali									5 dokumen	469.242.000	5 dokumen	443.977.500	10 kali	913.219.500	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA
			1.20.06.17.25	Gebyar PBB	Terlaksananya pemungutan PBB-P2	380.00%	123,22%	3.996.000	100,07%	136.219.103	82,44%	350.534.300	87,14%	296.505.400					392,87%	787.254.803	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA
			1.20.06.17.32	Sosialisasi Pajak daerah/retribusi	Terlaksananya pemahaman WP dalam membayar pajak	730 WP			249 WP	151.604.500	249 WP	34.108.800	249 WP	23.861.000					747 WP	209.574.300	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA
				Bimbingan Teknis Pajak Hotel dan Restoran	Terlaksananya BinteK terhadap Wajib Pajak yang memahami dan mematuhi pajak hotel dan restoran	180 Orang			200 orang	29.100.000									200 Orang	29.100.000	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		TAHUN - 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
							2011		2012		2013		2014		2015		2016		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Pekan panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rasio wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan	175%									90%	246.255.000	95%	122.180.000	185%	368.435.000	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA	
	Meningkatnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah		1.20.03.17	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Presentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									90%	553.420.000	90%	671.805.200	90%	662.031.800	90%	1.887.257.000	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA
			1.20.06.17.53	Pengadaan Sistem Aplikasi Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya sistem aplikasi pendapatan asli daerah	1 paket							1 paket	553.420.000					1 paket	553.420.000	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA	
				Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah	Jumlah sistem pengelolaan pajak daerah yang terpelihara	2 sistem									2 sistem	425.550.200	2 sistem	562.490.000	4 sistem	988.040.200	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA	
	Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah		1.20.03.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya Dokumen Perda, Laporan PAD dan Pajak Daerah				90%	55.887.500	90%	174.214.800	90%	397.812.800	90%	253.502.300	90%	222.728.300	90%	1.104.145.700	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA	
				Monitoring dan Evaluasi Retribusi daerah dan Pajak	Terlaksananya monev retribusi daerah dan pajak daerah yang tersusun	310 WP			312 WP	7.627.500									312 WP	7.627.500	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA	
			1.20.06.17.39	Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya evaluasi PAD yang tersusun	80 Dokumen			40 Dokumen	28.760.000	25 Dokumen	36.080.000	20 Dokumen	257.872.800					85 Dokumen	322.712.800	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA	
			1.20.06.17.45	Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang mendapat pembinaan	6.300 WP			312 WP	19.500.000	766 WP	138.134.800	1.375 WP	139.940.000	2.418 WP	253.502.300	1.500 WP	222.728.300	6.371 WP	773.805.400	DINAS PENDAPATAN	JEMBRANA	
				Jumlah				163.850.600		1.783.542.400		4.972.256.100		5.717.107.350		5.995.717.100		5.995.717.100		24.628.190.650	DINAS PENDAPATAN		